

Media Cetak	Harian Fajar
Tanggal	Selasa 03 September 2024
Wilayah	Kabupaten Bone



Proyek Jalan Wajo Berlokasi di Bone

Proyek Jalan Wajo Berlokasi di Bone

PPK Tidak Cermat, Didesak Tender Ulang

REPORTER IMAN SP
EDITOR RIDWAN MARZUKI

SENGKANG, FAJAR – Keteledoran terjadi. Proyek survei jalan untuk Wajo, malah berlokasi di Bone.

KEGIATAN survei kondisi jalan oleh Dinas (Kadis) Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan (PUPRP) Wajo dianggap sangat keliru tahun ini. Survei dialokasi anggaran

via APBD Wajo, namun justru salah titik. Berdasarkan penelusuran FAJAR di laman lpse-wajokab.go.id, terdapat kegiatan survei kondisi jalan dengan nilai

pagu Rp300 juta. Tahap tender saat ini masa sanggah pra-akualifikasi.

Diselisik lebih jauh pada *soft file* unggahan uraian pekerjaan survei, lokasi kegiatan jasa konsultasi dilaksanakan di Kecamatan Bontocani, Kahu, Kajuara, Salomekko, Tonra, Patimpeng, Libureng, Mare. Nama-nama kecamatan itu bukan di Wajo, melainkan secara administratif berada di Kabupaten Bone.

"Bukan kami yang unggah itu dek. Uraian kegiatan atau

pekerjaan, termasuk penginputan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) paket itu diunggah PPK-nya," ujar Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah (Setda) Wajo, Masriadi, Senin, 2 September.

Dia mengaku tidak mengetahui kesalahan lokasi itu. *File* uraian pekerjaan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masing-masing diunggah PPK. Menurutnya, pihak LPSE Wajo hanya mempunyai tugas menyelenggarakan proses pengadaan barang atau jasa di

lingkup Pemkab secara elektronik.

"Mungkin PPK-nya lupa edit. Karena kami hanya prosestendernya," ucapnya.

Dalam catatan FAJAR, kesalahan yang sama pernah terjadi dalam proyek penyelenggaraan jalan dalam perkotaan. Waktu pelaksanaan pekerjaan di uraian singkat pekerjaan, tercatat nama ruas Tingaraposi-Minangatellue, Kecamatan Maniangpajo.

PPK dari kedua kegiatan tersebut Kepala Bidang Bina

Marga, Yasser. Sementara yang bersangkutan yang hendak dikonfirmasi tidak menjawab.

Menyikapi kekeliruan tersebut, anggota DPRD Wajo, Taqwa Gaffar menyayangkan kesalahan administrasi tersebut. Menurutnya, proses tender survei kondisi jalan tersebut dihentikan.

"Tidak bisa dilanjutkan itu. Harus ditarik, PPK harus diperbaiki semua, kemudian diajukan kembali ke LPSE untuk tender," tegasnya. (*)